



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Tak Dapat WTP, Proyek Multiyears Jadi Alasan

SELUMA- Dari hasil audit BPK RI tahun 2018, Kabupaten Seluma kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2019 ini. Salah satu penghambat untuk mendapatkan gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemkab Seluma menyebut ini merupakan kesalahan manajemen atau pemerintahan sebelumnya yang melaksanakan proyek multiyears.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Seluma, Drs. Suparto, M.Si saat sidang paripurna dengan agenda nota pertanggungjawaban Bupati Seluma H. Bundra Jaya, SH, MH tentang laporan pelaksanaan APBD tahun 2018, kemarin (17/6).

Dalam laporannya, wabup mengatakan berdasarkan penilaian tim auditor BPK RI, bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten Seluma secara garis besar telah layak memperoleh WTP. Selain itu BPK juga memberikan apresiasi kepada pejabat penatausahaan keuangan daerah yang sudah berkerja keras dalam memberikan informasi data non teknis yang diberikan ke BPK.

"Dengan berat hati saya sampaikan, WTP masih belum bisa kita peroleh atas RKPD tahun 2018. Hal ini akibat manajemen pemerintah sebelumnya atas temuan proyek multiyears yang masih menghambat pemberian opini WTP oleh BPK RI," jelas Suparto,

Terkait hal ini, tambah Suparto, dirinya meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdapat temuan audit BPK untuk menindaklanjuti temuan tersebut agar tahun 2020 Kabupaten Seluma bisa mendapatkan predikat WTP.

"Saya minta OPD melalui sekda untuk menindaklanjuti temuan tersebut agar di tahun selanjutnya bukti-bukti administrasi bisa dilengkapi, dan temuan tidak muncul lagi saat audit BPK RI berikutnya," tegas Suparto.

Menyikapi pernyataan Bupati Seluma, H. Bundra Jaya, SH, MH yang disampaikan wabup tersebut, dibantah oleh Ketua Komisi III DPRD Seluma, Khairi Yulian. Khairi tidak sependapat jika proyek multiyears tahun 2010 dikatakan penghambat pemberian WTP kepada Kabupaten Seluma.

Khairi meminta jangan selalu menyalahkan pemerintahan masa lalu, tanpa pemerintahan masa lalu tidak mungkin ada pemerintahan sekarang. "Jadi tidak baik saling menyalahkan, baiknya itu benahi. Apa yang dipermasalahkan oleh BPK RI sehingga Seluma meraih predikat WDP harus dibenahi, itu baru benar. Bukannya saling menyalahkan," tandasnya.

Dari hasil audit BPK RI tahun 2018 lalu, selain adanya temuan di lima OPD terkait realisasi APBD 2019 yakni di Dinas Perikanan, Dinkes, Disperindagkop UKM, Dinas Pendidikan dan RSUD Tais, juga karena aset tidak bergerak yang belum terinventarisir oleh Pemkab Seluma. Sehingga BPK RI meminta agar semua aset tersebut diinventarisir agar predikat WTP dapat diraih Pemkab Seluma. (aba)